Al-Dalil
Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Vol. 1, No. 2, Juli 2023 ISSN: 2987-0976

REPRESENTASI PEREMPUAN DI POLITIK
(Studi Kasus Anggota Legislatif Perempuan dalam Menjalankan Fungsinya di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Rex Tiran[1], Diana S.A.Natalia Tabun[2], Rouwland A. Benyamin [3], Johannes Fisher Keon[4]
[1,2,2]Fakultas Ilmu Sosila dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana
[1]baitdina6@gmail.com

Abstract

The political representation of women sticks out in the midst of domination and hegemony of patriarchal culture in various dimensions of life, especially in the political space. There is a kind of socio-political obstacle that forces women to double their capital and power, which must be spent more heavily and complicated than men when they enter politics. This study wants to see how far the role of women legislators in the NTT Provincial DPRD for the 2019-2024 period is in carrying Political parties and are in accordance with the interests of the categorization of women members of the legislature. The strategy for dividing positions for women is also quite diverse. Women have political hopes that are placed on increasing access power and opening up political opportunities to occupy strategic positions such as important positions or involvement in the decision-making process in political parties. The hope for increasing access is related to increasing the capacity of individual women and youth in political parties. Increasing women's access to strategic positions in political parties. This political hope emphasizes the importance of women and youth to have economic, social and political capacities. Economic capacity relates to financial resources, social capacity refers to social relations and networks, and political capacity relates to political knowledge and skills.

Kata Kunci:

Representasi Perempuan
Politik
Anggota Legislatif

Abstrak

Di bawah dominasi dan hegemoni budaya patriarki, representasi politik perempuan sangat menonjol dalam segala aspek kehidupan, khususnya di bidang politik. Ada hambatan sosiopolitik yang memaksa perempuan untuk melipatgandakan modal dan kekuasaannya, yang harus lebih mahal dan kompleks daripada laki-laki untuk memasuki politik. Kajian ini berupaya memahami peran anggota parlemen perempuan di DPRD Provinsi NTT dalam mendukung partai politik dan sejauh mana hal tersebut sesuai dengan kepentingan rahasia anggota parlemen perempuan periode 2019-2024. Strategi untuk membatasi posisi perempuan juga cukup beragam. Harapan politik perempuan bertumpu pada peningkatan akses kekuasaan dan membuka peluang politik untuk menempati posisi strategis, seperti posisi kunci atau partisipasi dalam proses pengambilan keputusan partai. Harapan akan peningkatan kesempatan untuk berpartisipasi terkait dengan pemberdayaan perempuan dan individu pemuda dalam partai politik.

Corresponding Author:

Diana S.A.Natalia Tabun
Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Nusa Cendana
baitdina6@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam relasi gender antara laki-laki dan perempuan, perempuan selalu ditempatkan di area domestic (urusan dapur dan mengurus anak), hal tersebut menjadi stigma bagi sebagaian besar kehidupan sosial politik masyarakat di NTT. Hal itu tentunya membuat kaum perempuan sulit untuk membangun dan mengembangkan kapasitas diri. Implikasinya adalah sebagaian besar kaum perempuan tidak ingin masuk dalam bursa calon legislative di NTT. Sehingga yang terjadi adalah keberadaan calon legislative perempuan hanya untuk memenuhi kuota keterwakilan di Partai politik yaitu 30% Daftar Calon Tetap. Namun faktanya, terdapat perempuan-perempuan NTT yang memiliki kapasitas mumpuni sehingga dapat lolos menjadi anggota DPRD NTT kendati dalam jumlah yang terbatas. Pada pemilihan legislatif tahun 2019, tercatat dari jumlah 65 kursi yang diperebutkan hanya ada 12 kursi yang diadapatkan oleh anggota legislative perempuan, sisanya 53 kursi ditempati oleh anggota legislatif laki-laki.

Komposisi anggota legislatif di DPRD Provinsi NTT periode 2019-2024 masih didominasi oleh anggota DPRD laki-laki dengan prosentase 93% anggota legislatif laki-laki dan 7% anggota legislatif perempuan. Komposisi tersebut dinilai masih timpang yang mana target keterwakilan anggota legislatif perempuan di DPRD idealnya mencapai 30%. Hal ini menjelaskan bahwa pengruh budaya patriarkhi masih cukup kuat dalam mempengaruhi preferensi politik masyarakat pada saat pemilihan anggota legislatif provinsi NTT. Terlepas dari fakta komposisi anggota legislatif DPRD NTT yang demikian, kinerja yang dihasilkan DPRD provinsi NTT selama ini merupakan kinerja lembaga yang mana 7% anggota legislatif perempuan juga berkontribusi di dalamnya.

Wacana terkait representasi politik perempuan mencuat di tengah dominasi dan hegemoni budaya patriarkhi dalam berbagai dimensi kehidupan terutama ruang politik. Perempuan dalam budaya patriarki pada umumnya dikonstruksikan secara sosial dan politik untuk menyandang peran, mengemban karakter serta berperilaku pada ranah privat (domestik). Kadarnya bervariasi dari yang ekstrim eksklusi hingga yang lebih moderat serta yang lebih cair berfusi. Kendati demikian, semuanya tetap bersifat menghambat dan tidak membiasakan perempuan untuk mampu berkiprah pada ranah publik. Ada semacam hadangan sosial-politik yang membuat perempuan harus menggandakan modal dan daya yang harus dikeluarkan lebih berat dan pelik dibandingkan dengan laki-laki saat memasuki dunia politik.

Seiring berkembangnya isu gender yang dilatari gelombang feminisme kedua dan ketiga, peran dan kedudukan perempuan dalam bidang politik kian menjadi sorotan. Representasi perempuan dalam bidang politik dinilai penting tidak hanya untuk menghadirkan sosok perempuan dalam ranah publik, tetapi lebih dari itu untuk dapat mengakomodir kepenntingan kaum perempuan. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Partai Politik dan Pemilihan Umum telah memberi ruang bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi di bidang politik. Namun persoalan mendasarnya adalah sejauh mana anggota legislatif perempuan diberi ruang untuk mengaktualsiasikan dirinya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya di ruang politik (DPRD) baik itu fungsi legislasi, fungsi kontrol, maupun fungsi budgetting.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, di mana peneliti akan mendeskripsikan tentang bagaimana keterlibatan perempuan dalam arena politik. Sumber Data : Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

a) Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara observasi, wawancara mendalam dengan informan selama penelitian berlangsung, dan data yang diperoleh langsung dari dokumentasi penelitian.
b) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen baik literature laporan, laporan, arsip, yang berkenan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data: Wawancara: Wawancara dengan maksud mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dalam hal ini percakapan itu di lakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dan merupakan proses untuk mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara dialog anatara peneliti sebagai pewawancara dengan informan atau yang memberikan informasi untuk mendpatkan data yang akurat dan kongrit. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang di gali dari sumber data langsung melalu percakapan atau Tanya jawab. Pengamatan atau Observasi: Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui gambaran umum lokasi penelitian dan deskripsi permasalahan. Menurut Alwasila (2002:98) teknik memungkinkan peneliti menarik kesimpualan ihwal makna, dan sudut pandang responden, kejadian, perisistiwan, atau proses yang diamati. Dokumentasi: Sugiyono menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Subjek dan Informan: Subjek Penelitian Untuk menentukan informan, maka peneliti menentukan secara purposive sampling yaitu pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu, misalnya informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, atau mungkin informan tersebut sebagai penguasa sehingga akan memudahkan

peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Informen Penelitian Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Tokoh Adat, Pemerintah, Para Poilitisi yang menjadi informen kunci.

3. PEMBAHASAN

Fakta menarik terkait representasi politik perempuan di NTT adalah lingkup sosio-kulturalnya yang masih kental dengan praktek budaya patriarkhi. Representasi politik perempuan di DPRD NTT memiliki latar belakang sejarah yang cukup Panjang. Sebelum hadirnya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang mengatur agar komposisi penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%, tidak satupun perwakilan perempuan di DPRD NTT. Namun pada momen pemilu legislative tahun 2009, pasca UU Penyelenggaraan Pemilu diterapkan, sebanyak 4 orang perempuan NTT terpilih sebagai anggota DPRD NTT, yakni: 1] Angela Mercy Piwung dari partai PKPB dan dapil 6; 2] Trisna Lilyani Dano dari partai PDS dan dapil 7; 3] Emelia Julia Nomleni dari partai PDIP dan dapil 3; 4] Rambu Asana Marisi dari partai Demokrat dan dapil 4.

Berlanjut ke pemilu legislate tahun 2014, keterwakilan perempuan di lembaga DPRD NTT bertambah menjadi 5 orang yakni: 1] Aleta Kornelia Baun dari partai PKB dan dapil 8; 2] Angela Mercy Piwung dari partai Hanura dan dapil 5; 3] Yeni Veronika dari partai PAN dan dapil 4; 4] Kristien Samiyati Pati dari partai NASDEM dan dapil 3; dan 5] Pdt. Adriana R Kahi Awa Kossi dari partai Golkar dan dapil 3. Dari kelima figure yang ada, hanya satu orang yang merupakan anggota lama yakni Angela Mercy Piwung, sedangkan keempat lainnya adalah orang baru.

Jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD NTT kian meningkat drastic pada pemilihan legislatif NTT perode 2019-2024 yakni sebanyak 12 orang. Hal tersebut menunjukkan semakin tingginya tingkat kepercayaan dan keyakinan masyarakat (pemilih) terhadap kinerja anggota legislatif perempuan. Tingkat kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap anggota legislatif perempuan dibuktikan dengan output regulasi yang dihasilkan atas inisiatif anggota legislatif perempuan seperti, Perda Kesehatan Ibu dan Anak, Perda Lingkungan Hidup, Perda Tenaga Kerja Indonesia, Perda Pengarusutamaan Gender, dan Perda Perlindungan Anak ditambah dengan Program Ayah Asuh.

a) Faktor Pendukung Perempuan

Beberapa faktor yang mendorong perempuan terjun di dunia politik diantaranya adalahadanya kebijakan yang mengharuskan partai politik untuk menyertakan perempuan dalam dunia perpolitikan tanah air khususnya melalui pemilu legislatif. Contoh yang terakhir tentu UU No. 5 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dimana pada pasal 55 menyebutkan kuota minimal 30% perempuan bagi partai politik. Hal itulah yang kemudian mendorong semakin banyaknya perempuan yang ikut dalam pesta demokrasi 5 tahunan. faktor pendukung lainnya adalah dukungan partai politik, motivasi kader, faktor keluarga, rekam jejak, basis massa yang banyak dan sistem multi-partai..

b) Faktor Penghambat Perempuan

Faktor penghambat yang mempengaruhi keterpilihan perempuan antara lain incumbent yang mencalonkan kembali dan money politicMinimnya keterwakilan perempuan di dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan di Indonesia menjadi persoalan ketika transisi menuju demokrasi menuntut kesetaraan dan keadilan perempuan. Kondisi sosiokultur bangsa yang pekat dengan budaya patriarki menjadi salah satu faktor penghalang untuk aktualisasi perempuan sebagai pengambil kebijakan pembangunan bangsa ini. Budaya patriarki menggambarkan tingginya dominasi laki-laki yang tidak memberikan kesampatan pada perempuan. Budaya ini menganggap perempuan lemah dan lebih memposisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Dengan kondisi seperti ini, maka kemampuan finansial kaum perempuan juga menjadi terbatas. faktor inilah yang terjadi di NTT. perempuan berperan dalam wilayah domestik (rumah tangga) sehari-hari, sedangkan laki-laki dipercayakan berperan dalam wilayah publik mengurusi urusan politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Perempuan dianggap tidak memiliki kemampuan atau menyalahi norma dan kehendak sosial apabila berperilaku menyimpang dari norma dengan masuk ke dalam ranah politik. Hal inilah yang menyebabkan perempuan tidak memiliki keberanian untuk masuk ke dalam politik. laki-laki lebih mendominasi partai politik serta sistem pemilu yang kurang efektif. Idealnya partai politik menjadi akses penting perempuan untuk masuk ke dalam politik menjadi wakil rakyat, namun dari partai politik sendirilah yang menghambat akses perempuan khususnya saat rekrutmen caleg. Prosedur nominasi caleg ditentukan oleh elit partai politik, ditambah lagi dalam struktur pengurusan partai politik banyak di dominasi oleh elit laki-laki. Kalaupun perempuan aktif di dalam partai politik, kecenderungan tidak ditempatkan dalam posisi strategis sebagai pembuat kebijakan.

c) Representasi Anggota Legislatif Perempuan dalam Politik

Demokrasi mengamankan adanya persamaan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat dalam semua wilayah publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Platform Aksi Beijing dan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Eliminationof All Forms of Discrimination

Againts Women atau CEDAW) merekomendasikan agar semua pemerintahan didunia agar memberikan lakukan kuota sebagai langkah khususnya yang bersifat sementara untuk meningkatkan jumlah perempuan di dalam jabatanjabatan appointif (berdasarkan hasil pemilihan) pada tingkat pemerintahan nasional.

Kesenjangan gender di kehidupan publik dan politik merupakan sebuah tantangan global yang terus dihadapi oleh masyarakat dunia. Meskipun telah ada berbagi konvesi, kovena dan komitmen internasional, namun secara rata-rata jumlah perempuan di dalam parlemen di dunia hanya 18,4 persen. 1 Dari 190 perempuan menjadi presiden atau perdana mentri. Hadirnya perempuan sebagai bagian dari cabinet yang ada didunia ini atau walikota, jumlah tak mencapai 7 dan 8 persen. Indonesia berkomitmen nasioanl dan internasional.Undang-undang Dasar 1945 menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta pengutamaan gender telah di adopsi menjadi sebuah kebijakan untuk mengintegrasikan persektif gender kedalam kebijakan, perencanaan dan penganggaran.

Tidakan afirmatif (affirmative 27 action) juga sudah diperkenalkan pada UU No. 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum untuk memastikan setidaknya 30 persen perempuan dicalonkan dalam daftar calon anggota legislatif untuk menangani masalah kekurangan keterwakilan gender dalam bidang politik di negara ini. Meskipun perempuan di Indonesia secara aktif memberikan sumbangsih mereka terhadap perekonomian nasional maupun rumah tangga melalui kerja produkrif dan reproduktif mereka, mereka masih tidak dilibatkan dari beragai struktur di proses pengambilan keputusan di keluarga masyarakat dan tingkat negara. Kurangnya keterwakilan perempuan dalam posisi-posisi pengambilan keputusan di sektor publik telah berujung pada pembangunan kebijakan ekonomi dan sosial yang memberikan keistimewaan terhadap pespektif dan kepentingan kaum lelaki, serta investasi sumber-sumber daya nasional dengan pertimbangkan keuntungan bagi kaum lelaki.

d) Eksistensi Anggota Legislatif Perempuan NTT

Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhomat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya bagi laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Namun sampai saat ini, perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap. Sosok perempuan yang berprestasi dan bias menyeinmbangkan antara keluarga dan karir menjadi 28 sangat langka ditemukan. Perempuan seringkali takut untuk berkarir karena tuntutan perannya sebagai ibu rumah tangga.

Pengertian Gender menurut (Helen Tierney (ed), adalah suatu konsep cultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosi antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat, Women's Studies Encyclopedia, Vol 1, New York: Green Wood Press, h.153).Mengacu pada pendapat Mansour Faqih, gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara social maupun cultural. Misalnya bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, emosianal, dan sebagainya.Sentara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, dan tidak boleh menangis. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Perubahan ciri dan sifat tersebut terjadi dari waktu-ke waktu, dan dari tempat-ke tempat yang lain, juga perubahan tersebut bias terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda.

Semua hal yang dapat dieprtukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bias berubah baik itu waktu maupun kelas (Mansour Faqih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogjakarta:Pustaka Pelajar, 2007), h.8-9). Masih dalam buku yang sama, Mansour Faqih, mengungkapan bahwa sejarah perbedaan gender terjadi melalui proses yang sangat panjang. Perbedaan gender terbentu oleh banyak yang dissosialisasikan, diajarkan, yang kemuadian diperkuat dengan mengkontruksinya baik secara social maupun cultural. Melalui proses panjang tersebut pada akhirnya diyakini sebagai suatu yang kodrati baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan, hal ini kemudian direfleksikan sebagai suatu yang dianggap alami menjadi identitas gender yang baku.

Identitas gender adalah definisi seseorang tentang dirinya, sebagai laki-laki ataupun perempuan yang merupakan interaksi kompleks antara kondisi biologis dan berbagai karakteristik perilaku yang dikembangkan sebagai hasil proses social. Kesetaraan gender menurut (Nasarudin Umar, argument kesetaraan gender perspektif al-qur'an, Jakarta-:paramadina 2001,.35) adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperolah kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, social, budaya, pendidikan, dan pertahahnan, dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya deskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka meiliki akses kesempatan berpartisipasi, control atas pembangunan dn memperolah manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Adapun indicator kesetaraan gender adalah sebagai berikut:

1. Akses Yang dimaksud dengan aspek akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana memperolah akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya yang akan

dibuat. Sebagai contoh dalam hal pendidikan bagi anak didik adalah akses beasiswa melanjutkan pendidikan perempuan dan lai-laki secara adil dan setara atau tidak.

2. Partisipasi Aspek pertisiapasi merupakan keikutsertaan atau parsitipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sama dalam pengambilan keputusan ditempat yang sama atau tidak. 3
3. Kontrol Adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini apakah pemegangan jabatan tertentu sebagai pengambil keputusan didomonasi oleh gender tertuntu atau tidak
4. Manfaat Adalah kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Keputusan yang diambil oleh sekolah memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki atau tidak.

e) Kuatnya Budaya Patriarki

Partiaki menurut Englas dalam budiman (1981:hal, 23), adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti.Dalam domain keluarga, sosok yang disebut ayah memilki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda.Beberapa masyarakat partiarki juga patrilineal, yang berarti 31 bahwa properti dan gerlar yang diwariskan kepada keturunan lakilaki.Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintah dan hak istimewa laki-laki serta menempatkan posisi perempuan dibawah laki-laki. Walby mendeskripsikan bagaimana patriarki berubah dan mengalami evolusi serta migrasinya, dari rumah (private) menuju luar rumah (public).

Secara bertahap, bagaimanapun, perempuan mendapatkan akses yang lebih besar ke ruang public; terutama peluang mereka untuk pekerjaan meningkat, tetapi sistem kapitalisme tetap menjadi mereka sebagai sapi perah yang menguntungkan – dalam konsep buruh murah dan atap berkaca yang tak pernah pecah (never shattered glass-ceiling). Dus, perempuan (tidak lagi untuk masih) dieksploitasi oleh leluhur – individu (yaitu ayah atau suami) tetapi eksploitasi oleh orang secara kolektif di ruang publik (dalam profesi dan pekerjaannya). Walby juga menunjukkan bahwa dalam masyarakat kontemporer berbagai kelompok perempuan yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai kombinasi kebijakan publik yang buta–gerder dan kepentingan rumah keluarga kaya (misal paling gentir di Indonesia adalah berpindahan perempusn TKW Indonesia ke dalam keluarga kaya di Saudi Arabia via kebijakan negera yang tidak melindungi buruh migrant), (Walby, 1990)

Sistem sosial patriarki menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Dominasi mereka tidak hanya mencakup rana privat saja, melainkan juga dalam ranapublik yang lebih luas seperti pastisipasi politik, pendidikan, ekonomi, sosial, hukum dan lain-lain. Dalam rana privat dan budaya patriarki adalah akar munculnya berbagai kekerasan yang dialamatkan oleh laki-laki kepada perempuan. Atas dasar "Hak Istimewa" yang dimiliki laki-laki, mereka juga merasa memilki hak untuk mengeksploitasi tubuh perempuan.Secara historis patrialki telah terwujud dalam organisasi social, hokum, politik, agama, dan ekonomi dari berbagia budaya yang berbeda. Bahkan ketika secara tidak gamlang tertuang dalam konstitusi dan hokum sebagian besar masyarakata kontemporer adalah, pada praktiknya, bersifat partialkal.

a. Ranah privat

Privat menurut Walby (2014: 29-30) adalah sebuah homonym karena arti-artinya memliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Privat memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga privat dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskan atau membuat spesifik.

b. Ranah publik

Publik menurut Walby (2014: 29-30) adalah mengenai orang atau masyarakat, dimiliki masyarakat, serta berhubungan dengan, atau memengaruhi suatu bangsa, Negara, atau komunitas. Public biasanya di lawankan dengan swasta atau pribadi, seperti pada perusahaan public, atau suatu jalan.

Menurut ibu Angela mercy Piung salah satu kader dari Partai kebangkitan Bangsa bahwa perempuan itu setiap kali mengambil keputusan selalu dengan bijaksana kita lihat setiap organisasi perempuan selalu dengan kooperatif,pada dasarnya perempuan layak dan pantas dalam menjadi seorang pemimpin namun kurangnya dukungan dan support dari berbagai pihak.

f) Peran Perempuan Anggota Legislatif dalam menjalankan fungsinya

Pertama, Peran anggota legislatif perempuan di DPRD Prov NTT periode 2019-2024. Peran anggota legislatif perempuan di DPRD Prov NTT sudah berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yakni UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan sudah sesuai dengan kepentingan kategorisasi perempuan anggota legislatif. Distribusi posisi strategis bagi perempuan juga sudah cukup beragam yakni Emilia Nomleni sebagai ketua DPRD Prov NTT sekaligus Ketua PDI-P NTT, Lili Adoe sebagai Wakil Ketua dan Anggota DPRD NTT, Ince sayuna sebagai sekretaris Partai Golkar NTT serta wakil Ketua DPRD NTT. Hal senada juga sama dari Partai PKB dan Demokrat NTT juga menempatkan beberapa figur perempuan pada posisi strategis seperti Ann. W .Kolin (wakil ketua PKB NTT dan anggota DPRD NTT) dan Kristien S.Patty (Partai Nasdem NTT dan Wakil Ketua), jika dicermati figur figur diatas perempuan perempuan ini sudah

cukup senior keberadaannya dan memiliki kapasitas politik, artinya mereka mampu memainkan perannya secara maksimal.

Kedua, Perempuan memiliki harapan politik yang diletakan pada meningkatnya daya akses dan makin terbukanya kesempatan politik menempati posisi strategis seperti jabatan penting maupun keterlibatan dalam proses pengambilan keputusandi partai politik.Harapan untuk meningkatnya daya akses berhubungan dengan peningkatan kapasitas individu perempuan dan pemuda di dalam parta politik. Sedangkan harapan atas terbukanya kesempatan politik perempuan dan pemuda di dalam partai politik merujuk pada lingkungan internal dan ekseternal partai politik. Harapan-harapan politik ini diandaikan dapat direalisasikan secara komplementer sehingga menciptakan ekosistem politik yang ramah terhadap perempuan dan pemuda di dalam partai politik.

Ketiga, harapan meningkatnya daya akses perempuan terhadap posisi strategis di dalam partai politik. Harapan politik ini menekankan pentingnya perempuan dan pemuda untuk mempunyai kapasitas ekonomi, sosial dan politik. Kapasitas ekonomi berhubungan dengan sumber daya finansial, kapasitas sosial menunjuk pada relasi dan jaringan sosial, dan kapasitas politik berkaitan dengan pengetahuan dan ketrampilan politik. Penting bagi perempuan dan pemuda untuk memiliki tiga kapasitas ini sebagai modal untuk meingkatkan daya akses terhadap posisi strategis di dalam partai politik.

Kapasitas perempuan juga diandaikan akan meningkatkan kepercayaan diri pemuda dan terutama perempuan untuk dapat secara politik sadar dan berdaulat atas dirinya. menyampaikan bahwa kepercayaan diri ini sangat penting untuk mengurai dominasi senior, elit politik dan laki-laki sebagai pemain dan pengambil keputusan. Pemuda dan perempuan harus diberdayakan agar mempunyai kesadaran dan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan atas dirinya, tubuhnya, harapannya, minatnya dan seterusnya. Kesadaran dan kepercayaan diri perempuan dan pemuda ini juga berhubungan karakter yang perlu dipertahankan sebagai identitas agar dapat memberi warna dan kontribusi watak egaliterianistik bagi partai politik. Mikael Bataona (akademisi Widya Mandira) dan Laurensius Sayrani (akademisi Nusa Cendana) menjelaskan pentingnya karakter tersebut sebagai identitas yang perlu ada di dalam partai politik. Pemuda dan terutama perempuan dalam banyak kesempatan memiliki karakter egaliter dan idealisme yang bermanfaat bagi konsolidasi demokrasi di dalam tubuh partai politik.Temuan lapangan menunjukan sejauh ini karakter dan idealisme perempuan dan terutama pemuda berbenturan dengan kepentingan pragmatis partai politik yang celakanya perempuan dan pemuda lebih banyak berada pada pihak yang kalah. Ini seperti disampaikan Icshan Arman (GP Ansor NTT) dalam wawancara mendalam.

Kedua, harapan makin terbukanya kesempatan bagi perempuan dalam partai politik untuk menduduki jabatan-jabatan utama maupun terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. Harapan atas kesempatan ini meliputi ruang internal partai politik dan lingkungan masyarakat yang ada disekitarnya. Harapan terhadap makin terbukanya kesempatan di internal partai politik berkaitan denganmenciptakan sistem kaderisasi mulai dari persiapan, distribusi sampai sirkulasi yang jelas dan lingkungan politik internal yang dibangun di atas kerja sama laki-laki dan perempuan serta pemuda dan kaum tua. Sementara harapan atas kesempatan di ruang yang lebih luas yakni masyarakat sekitar mengarah padamembangun pendidikan dan kesadaran politik masyarakat akan pentingnya politik dan demokrasi yang melibatkan perempuan dan pemuda melaui kerja sama dengan jaringan masyarakat sipil dan kampus.

Secara internal partai politik, seperti diakui Inang Abdullah (PPP) dan Sheline Lana (Hanura), eksistensi struktural pemuda dan perempuan tidak menjadi jaminan keterlibatan mereka secara kultural di dalam proses pengambilan keputusan.Karena itu ruang kesempatan bagi perempuan dan pemuda tidak hanya dibuka dalan hubungannya dengan jabatan-jabatan struktural partai politik saja tetapi lebih dari pada itu adalah membuka ruang politik kultural bagi keterlibatan perempuan dan pemuda dalam proses pengambilan keputusan.

Untuk menciptakan ruang politik kultural yang memberikan kesempatan bagi perempuan dan pemuda untuk terlibat dalam posisi strategis maka ada sejumlah persoalan yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Persoalan-persoalan tersebut antara lain anggapan bahwa perempuan dan pemuda belum memiliki pengetahuan dan pengalaman politik, politik adalah domain senior dan kaum laki-laki, proses pengambilan keputusan yang panjang dan tidak tentu durasi dan waktunya, kuatnya relasi politik bercorak senioritas-yunioritas sehingga membentuk relasi patron-klien, dan adanya eksploitasi politik terhadap perempuan dan pemuda, budaya patriarkisme dan feodalisme yang kuat, dan sebagainya.Persoalan-persoalan ini sebagaimana teridentifikasi dalam diskusi terfokus dan wawancara.

Sebab itu partai politik harus memberdayakan dan membekali mereka dengan pelatihan dan edukasi politik dan ekonomi yang mumpuni. Partai politik perlu mendesain program pendidikan politik dan ekonomi perempuan dan pemuda secara serius. Program-program tersebut harus bersentuhan langsung dengan persoalan dan kebutuhan perempuan dan pemuda seperti pengetahuan dan ketrampilan politik, basis finansial tidak saja perempuan tetapi juga keluarga dan rumah tangga, keterhubungan dengan jaringan masyarakat sipil dan masyarakat, peremajaan partai politik, ruang dialog antara perempuan dan pemuda dengan laki-laki dan kaum tua, sampai dengan kerja sama partai politik dengan pemerintah daerah untuk mendorong kebijakan-

kebijakan pembangunan yang mendukung ruang kesempatan dan pengembangan diri perempuan dan pemuda.

Riset ini sekurang-kurangnya memotret sejumlah hal penting terkait perempuan dan pemuda di dalam partai politik. Sejumlah hal penting tersebut terpetakan atas existing condition, barriers and challenges, dan expectancies and solutions terhadap upaya membuka kesempatan dan meningkatkan daya akses perempuan dan pemuda terhadap posisi strategis di dalam partai politik. Posisi strategis dimaksud adalah jabatan struktural dan keterlibatan dalam proses penambilan keputusan. Berikut ini beberapa poin penting yang dapat dijadikan kesimpulan dan rekomendasi untuk kepentingan tersebut.

Pertama, kondisi empiris perempuan di dalam partai politik di NTT berhubungan dengan kesempatan dan daya akses terhadap posisi strategis masih memprihatinkan. Meskipun sejumlah partai seperti Golkar, PDIP, PKB, Nasdem, Demokrat, Hanura, Gerindra dan PPP telah cukup membuka diri untuk mengakomodir perempuan dan pemuda pada posisi strategis akan tetapi hal itu belum diikuti dengan keterlibatan secara substansial di dalam proses pengambilan keputusan. Perempuan dan pemuda dalam partai politik masih terbatas pada peran representasi simbolik.

Kedua, perempuan di dalam partai politik menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan dari dalam diri sendiri maupun lingkungan politik disekitarnya. Hambatan dan tantangan tersebut dapat dikategorikan sebagai cultural barriers and challenges yang bersifat internall dan eksternal perempuan dan pemuda di dalam partai politik, dan structural barriers and challenges yang bersumber pada lingkungan internal maupun eksternal partai politik. Cultural barriers and challengges merujuk pada kapasitas ekonomi, sosial dan politik perempuan dan pemudasecara individual, dan structural barrier and challenges menunjuk pada ruang politik dan lingkungan disekitar perempuan dan pemuda di dalam dan di luar partai politik.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a) Kesimpulan

Pertama, Peran anggota legislatif perempuan di DPRD Prov NTT sudah berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yakni UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan sudah sesuai dengan kepentingan kategorisasi perempuan anggota legislatif. Distribusi posisi strategis bagi perempuan juga sudah cukup beragam yakni Emilia Nomleni sebagai ketua DPRD Prov NTT sekaligus Ketua PDI-P NTT, Lili Adoe sebagai Wakil Ketua dan Anggota DPRD NTT, Ince sayuna sebagai sekretaris Partai Golkar NTT serta wakil Ketua DPRD NTT. Hal senada juga sama dari Partai PKB dan Demokrat NTT juga menempatkan beberapa figur perempuan pada posisi strategis seperti Ann. W .Kolin (wakil ketua PKB NTT dan anggota DPRD NTT) dan Kristien S.Patty (Partai Nasdem NTT dan Wakil Ketua), jika dicermati figur figur diatas perempuan perempuan ini sudah cukup senior keberadaannya dan memiliki kapasitas politik, artinya mereka mampu memainkan perannya secara maksimal.

Kedua, Perempuan memiliki harapan politik yang diletakan pada meningkatnya daya akses dan makin terbukanya kesempatan politik menempati posisi strategis seperti jabatan penting maupun keterlibatan dalam proses pengambilan keputusandi partai politik.Harapan untuk meningkatnya daya akses berhubungan dengan peningkatan kapasitas individu perempuan dan pemuda di dalam parta politik. Sedangkan harapan atas terbukanya kesempatan politik perempuan dan pemuda di dalam partai politik merujuk pada lingkungan internal dan ekseternal partai politik. Harapan-harapan politik ini diandaikan dapat direalisasikan secara komplementer sehingga menciptakan ekosistem politik yang ramah terhadap perempuan dan pemuda di dalam partai politik.

Ketiga, harapan meningkatnya daya akses perempuan terhadap posisi strategis di dalam partai politik. Harapan politik ini menekankan pentingnya perempuan dan pemuda untuk mempunyai kapasitas ekonomi, sosial dan politik. Kapasitas ekonomi berhubungan dengan sumber daya finansial, kapasitas sosial menunjuk pada relasi dan jaringan sosial, dan kapasitas politik berkaitan dengan pengetahuan dan ketrampilan politik. Penting bagi perempuan dan pemuda untuk memiliki tiga kapasitas ini sebagai modal untuk meingkatkan daya akses terhadap posisi strategis di dalam partai politik.

b) Saran

Harapan dan tawaran jalan keluar sebagai rekomendasi merujuk pada kepentingan menciptakan makin terbukanya kesempatan dan meningkatkan daya akses perempuan terhadap posisi strategis di dalam mengimplementasikan fungsinya. Faktor kesempatan berhubungan dengan penataan partai politik agar dapat menghadirkan lingkungan politik internal yang kondusif dan ramah bagi perempuan dan pemuda. Partai politik perlu untuk memiliki dan menjalankan sistem rekrutmen, distribusi dan sirkulasi kader serta aktivitas politik yang memperhatikan keterlibatan perempuan dan pemuda. Sistem dan aktivitas politik ini harus menjamin perempuan dan pemuda tidak hanya menduduki jabatan di struktur utama tetapi juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan di dalam partai politik. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, partai politik perlu melakukan peningkatan kapasitas perempuan dan pemuda secara berjenjang agar perempuan memiliki kapasitas ekonomi, sosial dan politik sebagai modal yang dibutuhkan dalam berpolitik. Partai politik juga harus bisa mendesain program-program yang bersentuhan langsung dengan persoalan perempuan yang ada di

ruang domestik maupun publik. Partai politik karenanya perlu membangun kerja sama lintas aktor dengan mengikutsertakan jaringan masyarakat sipil dan kampus dalam upaya melakukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas perempuan di dalam partai politik.

REFERENSI

Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, *40*(1), 3-27.

Bayo, L. N. (2021). Women who persist: pathways to power in Eastern Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, *40*(1), 93-115.

CSIS. (2017). Ada Apa dengan Milenial? Orientasi Sosial, Ekonomi dan Politik. Rilis dan Konferensi Pers "Survei Nasional CSIS 2017" Jakarta, 2 November 2017.

Lilijawa, I. (2010). *Perempuan, media, dan politik: bunga rampai refleksi sosial politik*. Ledalero.

Maulaka, Elsa. (2013). Perempuan Dalam Partai Politik: Studi Kasus di Kabupaten Kupang. JIPOL, Undana: Skripsi.

Massey, D. (2009). Concepts of Cpace and Power in Theory and in Political Practice. Documents D'anàlisi Geogràfica, (55), 15-26.

Ohman, M., & Lintari, C. (2015). Political party financing and equal participation of women in Kenyan electoral politics: A situation overview. *International Institute for Democracy and Electoral Assistance*.

Setiawaty, D. (2014). Mendorong Partisipasi Pemilih Muda Melalui Pendidikan Politik Yang Programatik. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, *3*(1), 117-146.

van Klinken, G. (2007). Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia. Jalarta: KITLV & Yayasan Obor.